

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

A P B N

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan anda dapat memahami pengertian, fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara serta mampu menganalisis peran APBN dalam pembangunan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang di biaya dari APBN

B. Uraian Materi

Anda pasti mengerti setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan anggaran untuk membiaya kegiatan tersebut, demikian juga pengelolaan negara memerlukan anggaran yang dibutuhkan untuk membiaya seluruh pengelolaan kenegaraan, Baiklah untuk lebih memahami anggaran yang dibutuhkan tersebut silahkan anda mempelajari materi APBN berikut ini.

1. Pengertian APBN

Anda pasti memahami setiap akan melaksanakan kegiatan diperlukan anggaran. Tahukah anda apa sebenarnya pengertian anggaran. Pengertian Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Artinya kebutuhan keuangan untuk membiaya suatu kegiatan. Di Indonesia kebutuhan keuangan disusun dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pasti anda pernah mendengar istilah tersebut. Sebenarnya apa itu APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Bagaimana sampai disini sudah paham dengan pengertian APBN, baik kita lanjutkan dengan kenapa harus ada APBN

2. Fungsi dan Tujuan APBN

Setelah anda memahami pengertian APBN selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan APBN yang setiap tahun nilainya terus meningkat terlebih pada pandemi Covid 19. Baik kita akan bahas secara rinci fungsi dan tujuan dari APBN.

2.1 Fungsi APBN

Anda pasti paham negara Indonesia sudah berumur 75 tahun tentunya sebagai sebuah negara yang berdaulat, biasanya suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan antara lain, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi.

- a) Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.
- b) Fungsi Distribusi
Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.
- c) Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.
- d) Fungsi Otoritas
Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.
- e) Fungsi perencanaan
Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.
- f) Fungsi regulasi
Fungsi regulasi APBN, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Baik untuk fungsi APBN sudah dibahas secara keseluruhan, dari enam fungsi diatas masih ada yang perlu dikuatkan pemahamannya, kalau sudah paham kita lanjutkan dengan tujuan penyusunan APBN

2.2 Tujuan APBN

Setelah anda memahami fungsi disusunnnya APBN bagi suatu negara harus juga kita ketahui. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara lain seperti:

- a) Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
- b) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
- c) Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- d) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal.
- e) Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.

Jika kita perhatikan dari kelima tujuan diatas secara umum disusunnnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja,

dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

3. Mekanisme penyusunan APBN

Bagaimana pemahaman anada tentang fungsi dan tujuan APBN, tentu saja sudah dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Untuk memudahkan pemahaman perhatikan bagan dibawah ini



Berdasarkan bagan di atas APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis
- 2) Pengajuan RAPBN oleh Pemerintah kepada DPR
- 3) Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang
- 4) Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang, jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya
- 5) APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.

Bagaimana masih ada yang belum paham tentang mekanisme penyusunan APBN. Kalau sudah paham silahkan untuk melanjutkan pada materi selanjutnya

C. Rangkuman

1. APBN adalah suatu daftar yang memerinci secara sistematis tentang sumber-sumber Penerimaan dan Belanja Negara yang berlaku pada satu periode
2. Fungsi APBN terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan dan fungsi regulasi
3. Tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.
4. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Presiden.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Kegiatan Pembelajaran 1 telah selesai anda ikuti, tentunya sudah banyak pengetahuan yang terkait dengan konsep APBN yang sudah anda ketahui berikut suatu kasus yang terjadi saat ini terkait dengan APBN. Sebelum anda menjawab tugas mandiri ini coba anda baca informasi di bawah ini.

“ Terkait Penanganan akibat Pandemi Covid 19, pada bidang pendidikan maka Pemerintah mengalokasikan bantuan kuota untuk siswa, guru dan mahasiswa “
Coba tuliskan pendapat anda terkait informasi di atas dilihat dari fungsi APBN.

E. Latihan Soal

Sebelum melanjutkan pada kegiatan pembelajaran ke 2, silahkan anda untuk menyelesaikan soal latihan dengan cara memilih jawaban yang paling tepat

1. APBN adalah....
 - A. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
 - B. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
 - C. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
 - D. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
 - E. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementerian dan lembaga selama periode tertentu.

2. APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah....
 - A. UU No. 14 Tahun 2019
 - B. UU No. 20 Tahun 2019
 - C. UU No. 4 Tahun 2020
 - D. UU No. 11 Tahun 2020
 - E. UU No. 20 Tahun 2020

3. Tujuan dari penyusunan APBN adalah....
 - A. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - B. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - C. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementerian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

- D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
4. Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah....
- A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
 - B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
 - D. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
5. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah....
- A. Fungsi Otoritas
 - B. Fungsi Perencanaan
 - C. Fungsi Alokasi
 - D. Fungsi Distribusi
 - E. Fungsi Pengawasan
6. Menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi....
- A. Fungsi Otoritas
 - B. Fungsi Perencanaan
 - C. Fungsi Alokasi
 - D. Fungsi Distribusi
 - E. Fungsi Pengawasan
7. APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah....
- A. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN
 - C. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
 - D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
 - E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

8. Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu...
 - A. UUD 1945 Pasal 23
 - B. UUD 1945 Pasal 28
 - C. UUD 1945 Pasal 29
 - D. UUD 1945 Pasal 30
 - E. UUD 1945 Pasal33

9. Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu...
 - A. DPRD
 - B. MPR
 - C. DPD
 - D. MA
 - E. BPK

10. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yatu ...
 - A. Alokasi
 - B. Regulasi
 - C. Distribusi
 - D. Stabilisasi
 - E. evaluasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KOMPONEN PENDATAAN DAN BELANJA NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan anda dapat menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Negara, mengidentifikasi sumber Pendapatan dari Dalam Negeri, mengidentifikasi sumber Pendapatan dari Luar Negeri, menjelaskan jenis-jenis belanja negara dan mengidentifikasi Jenis-jenis belanja negara

B. Uraian Materi

Pada Kegiatan Pembelajaran ke 1 anda sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan pengertian, fungsi, tujuan dan mekanisme penyusunan APBN, dan sudah dikuasai dengan baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada kegiatan pembelajaran ke 2 dengan materi sumber pendapatan dan belanja negara,

1. Sumber Pendapatan Negara

Perhatikan oleh anda bagan struktur APBN tahun 2020 dibawah ini

APBN Tahun 2020
(Triliun Rupiah)

Uraian	2019	2020	
	Outlook	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.030,8	2.221,5	2.233,2
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.029,4	2.221,0	2.232,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.643,1	1.861,8	1.865,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	386,3	359,3	367,0
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,5	0,5
B. BELANJA NEGARA	2.341,6	2.528,8	2.540,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.527,2	1.670,0	1.683,5
1. Belanja K/L	854,9	884,6	909,6
2. Belanja Non K/L	672,2	785,4	773,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	814,4	858,8	856,9
1. Transfer ke Daerah	744,6	786,8	784,9
2. Dana Desa	69,8	72,0	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(34,7)	(12,0)	(12,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(310,8)	(307,2)	(307,2)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(1,93)</i>	<i>(1,76)</i>	<i>(1,76)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	310,8	307,2	307,2
I. PEMBIAYAAN UTANG	373,9	351,9	351,9
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(75,8)	(74,2)	(74,2)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(2,3)	5,2	5,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	0,0	(0,6)	(0,6)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	15,0	25,0	25,0

Tabel : APBN tahun 2020

Setelah memperhatikan tabel di atas anda sudah dapat mengetahui susunan dari APBN. Struktur APBN secara garis dibagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan

dan Belanja Negara . Pendapatan Negara yang anda lihat pada tabel di atas dibagi menjadi Pendapatan Dalam Negeri dan Penerimaan Hibah.

1.1 Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan Dalam Negeri artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang termasuk penerimaan dalam negeri yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan , cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Berdasarkan penjelasan di atas apakah anda telah meyumbangkan penerimaan untuk negara ?
- 2) Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

1.2 Penerimaan Hibah

Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri, Hibah yang diterima. Bentuk hibah bisa dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga.

Sampai disini apakah ada yang belum anda pahami, untuk menambah pengetahuan tentang hibah , silahkan untuk membuka tautan dibawah ini

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>

2. Belanja Negara

Silahkan anda lihat kembali tabel APBN di atas. Jika kita perhatikan secara garis besar belanja negara dibagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Anda pasti bertanya mengapa harus ada belanja negara? Pengelolaan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran, namun pengeluaran yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan

- a. melaksanakan pembangunan nasional,
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,
- c. memperlancar roda perekonomian,
- d. membiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
- f. mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis,

2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Baik kita lanjutkan pembahasan belanja pemerintah pusat, jika kita rinci belanja pemerintah pusat terdiri atas

2.1.1 Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus menerus. Pengeluaran rutin terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya seperti pengeluaran untuk surat menyurat, giro pos, biaya pemilu dan subsidi-subsidi.

Penguatan informasi gaji pegawai Negeri sipil (ASN) merupakan salah satu contoh dari belanja pegawai yang pada APBN 2020 mencapai nilai 416 Trilyun rupiah.

2.1.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor/sub sektor. Pengeluaran pembangunan sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah (pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung) dan bantuan proyek (pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek)

2.2 Belanja Pemerintah Daerah

Jika diperhatikan tabel di atas belanja pemerintah daerah dialokasikan dalam tranfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah daerah terdiri atas:

2.2.1 Dana perimbangan yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah batas arahan pemerintah pusat
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat

2.2.2 Dana otonomi khusus dan penyeimbang

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, contoh pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua

Bagaimana sampai disini masih ada yang belum dipahami jika belum silahkan dibaca kembali atau kalau anda memiliki teman yang dianggap berkemampuan pada materi ini silahkan untuk didiskusikan.

3. Kebijakan-Kebijakan Anggaran

Coba anda perhatikan tabel APBN 2020 diatas, pada tabel tersebut tertulis surplus (defisit) Anggaran. Apakah anda sudah memahami arti surplus dan defisit? Selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang hal tersebut. Surplus dan defisit adalah cara pemerintah menetapkan kebijakan pada saat

penyusunan APBN,. Pada dasarnya kebijakan anggaran terbagi atas dua macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang.

a. Kebijakan Anggaran Berimbang

Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP I (1969/1970–1994/1995) menerapkan anggaran berimbang dinamis.

Dinamis berarti bahwa dalam penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. Demikian pula dalam hal penerimaan negara melebihi dari yang direncanakan, masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan.

b. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang

Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian.

c. Kebijakan Anggaran Dinamis

Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.

d. Kebijakan Anggaran Anggaran Defisit

Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya.

e. Kebijakan Anggaran Anggaran Surplus

Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.

Berdasarkan penjelasan sekarang anda sudah paham mengapa dalam setiap penyusunan APBN pemerintah menetapkan APBN surplus atau defisit sesuai dengan kondisi perekonomian.

4. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

Kali ini kita akan membahas tentang "Pengaruh APBN terhadap perekonomian" APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. dengan APBN tujuan dan prioritas pembangunan sebuah negara dapat di rumuskan. bisa lebih fokus dengan adanya APBN. Akan di arahkan pembangunannya ke arah mana melalui APBN dapat lebih mudah. lalu Apa pengaruhnya terhadap perekonomian. Dampak bagi masyarakat dan Negara. Pengaruhnya antara lain adalah;

- 1.1 Di sini dapat di ketahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
- 1.2 Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat di atur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga
- 1.3 Industri - industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi.
- 1.4 Bisa di ketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan.
- 1.5 Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

C. Rangkuman

1. Struktur APBN terbagi atas Pendapatan dan Belanja Negara dimana Pendapatan Negara dibagi menjadi Pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah.
2. Pendapatan dalam negeri meliputi pendapatan yang berasal dari Pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan diluar pajak seperti laba dari BUMN, bagian dari pengelolaan sumber daya alam
4. Penerimaan hibah adalah merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri
5. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah, dimana belanja pemerintah pusat terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
6. Belanja Pemerintah daerah terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus dan penyeimbang. Dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK, sedang dana otonomi khusus dan penyeimbang diberikan kepada daerah otonom.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Sukses buat anda telah menyelesaikan pembahasan Kegiatan pembelajaran 2, untuk lebih meningkatkan wawasan coba anda untuk menyimak link <https://www.youtube.com/watch?v=zKx6MVVMxX0> , selanjutnya tuliskan pemanfaatan dari APBN pada tahun 2020,

E. Latihan Soal

Sebelum melanjutkan pada materi berikutnya silahkan anda untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu latihan soal, agar dapat mengetahui sudah berapa persen pemahaman anda terhadap materi ini.

Pilihlah jawaban yang paling tepat:

1. Postur APBN secara umum terdiri atas Pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagai atas....
 - A. Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak
 - B. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri (hibah)
 - C. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak
 - D. Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak
 - E. Pendapatan pajak dan pendapatan hibah
2. Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri
 - A. Pajak penghasilan
 - B. Pajak perdagangan ekspor
 - C. Cukai
 - D. Hadiah dari negara asing
 - E. Laba dari BUMN
3. Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen....
 - A. Hibah
 - B. Penerimaan Pajak
 - C. Penerimaan pinjaman
 - D. Penerimaan dalam negeri
 - E. Penerimaan lain-lain
4. Perhatikan komponen pendapatan berikut ini
 1. Pajak penghasilan (PPh)
 2. bagian laba dari BUMN
 3. Cukai
 4. Pungutan ekspor
 5. Penerimaan dari pengelolaan SDADari komponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor....
 - A. 1, 2 dan 3
 - B. 2, 3 dan 4
 - C. 3, 4 dan 5
 - D. 1, 3 dan 4
 - E. 2, 4 dan 5

5. Komponen belanja negara dalam APBN terbagi atas.....
- Belanja Pemerintah pusat dan belanja rutin
 - Belanja pembangunan dan pengeluaran daerah
 - Belanja Pemerintah pusat dan belanja pembangunan
 - Belanja rutin dan belanja pembangunan
 - Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah
6. Tabel APBN selama 2 tahun sebagai berikut:

	Uraian	APBN-P 2014	APBN-P 2015
A	Pendapatan Negara dan Hibah	1.635.378,1	1.768.970,6
	1. Penerimaan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.765.662,2
	2. Hibah	2.325,1	3.308,4
B	Belanja Negara	1.876.872,8	1994.888,7
	1. Belanja Pemerintah Pusat	1.280.368,6	1.330.766,8
	2. Transfer ke Daerah	596.504,2	664.121,9

Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut ini yang benar adalah...

- Pemerintah menerapkan surplus anggaran dengan dgn jumlah pendapatan lebih besar dari belanja
 - Pendapatan negara mengalami penurunan baik penerimaan dalam negeri maupun hibah
 - Anggaran negara dalam 2 tahun mengalami surplus anggaran disebabkan pendapatan lebih besar dari pengeluaran
 - Defisit anggaran tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014dikarenakan pengeluaran lebih besar dari pendapatan
 - Belanja negara mengalami peningkatan baikbelanja pemerintah pusat maupun untuk transfer ke daerah
7. Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut....
- Dana alokasi khusus
 - Dana alokasi umum
 - Dana talangan khusus
 - Dana bantuan bencana
 - Dana alokasi khusus
8. Jika disusun APBN dengan menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah....
- Anggaran surplus
 - Anggaran dinamis
 - Anggaran berimbang
 - Anggaran defisit
 - Anggaran tidak dinamis

9. Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ...
 - A. Belanja khusus
 - B. Belanja pemerintah pusat
 - C. Belanja pemerintah daerah
 - D. Belanja daerah otonomi
 - E. Belanja pembangunan

10. APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara, yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah....
 - A. Pertumbuhan ekonomi meningkat
 - B. Peningkatan GNP
 - C. Panambahan jumlah uang yang beredar
 - D. Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal
 - E. Peningkatan lapangan kerja

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

A P B D

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian APBD, menjelaskan fungsi dan tujuan dari APBD, mekanisme penyusunan APBD, mengidentifikasi komponen penerimaan dan jenis belanja pada APBD, menganalisis pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi dan menumbuhkan peduli untuk mengembangkan daerah masing-masing.

B. Uraian Materi

Pada kegiatan pembelajaran ke tiga kita akan mempelajari APBD, yang akan menjelaskan tentang pengertian APBD, Fungsi, Tujuan, Komponen Pendapatan dan belanja daerah serta pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi. Anda tentunya berharap kegiatan pembelajaran ini akan lebih meningkatkan pengetahuan khususnya APBD dan tentunya pengetahuan yang sudah anda miliki mendorong kita untuk lebih mencintai Indonesia. Baik kita akan mulai pembahasannya.

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari Daerah Tingkat II kota dan kabupaten dan Daerah TK I Provinsi.

2. Fungsi dan tujuan APBD

2.1 Fungsi APBD

Pada pembahasan APBN kita sudah membahas fungsi APBN, selanjutnya kita membahas tentang APBD, tentunya kita bertanya apakah fungsi APBN dan APBD memiliki kesamaan?. Baik untuk membahas pertanyaan tersebut kita akan bahas tentang fungsi APBD.

Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat.
- b. Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- d. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi – APBD adalah ‘uang rakyat’, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan.
- f. Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

2.2 Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya:

- a. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
- b. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
- d. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

3 Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBN sudah kita pelajari tentunya adan sudah paham, sekarang bagaimana mekanisme penyusunan APBD ?

Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- b. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
- c. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
- d. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
- e. Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya anggaran
- f. APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi

4 Komponen APBD

Baik selanjutnya kita akan membahas tentang komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk menambah wawasan silahkan anda perhatikan secara seksama contoh APBD Pemerintah Kabupaten X dari tahun 2011-2013 berikut:

APBD	2011	2012	2013
Pendapatan	317,164	403,041	442,235
Pendapatan Asli Daerah	67,467	71,852	87,647
- Pajak Daerah	45,126	47,682	62,365
- Retribusi Daerah	7,650	8,035	7,637
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3,420	3,637	4,845
- Lain-lain PAD yang Sah	11,271	12,498	18,884
Dana Perimbangan	275,266	295,281	302,264
- Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	69,768	77,677	71,934
- Dana Alokasi Umum	187,196	193,226	207,081
- Dana Alokasi Khusus	18,302	21,378	23,250
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44,431	38,908	52,297
- Hibah	2,309	4,248	2,408
- Dana Darurat	551	377	295
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	11,663	11,961	13,115
- Dana Penyeruisan dan Otonomi Khusus	20,852	15,497	29,645
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	2,242	4,955	5,185
- Lain-lain	6,814	1,871	2,015
Belanja	353,300	443,565	474,135
Belanja Tidak Langsung	212,449	241,573	251,438
- Belanja Pegawai	161,904	174,762	251,461
- Belanja Bunga	316	187	179
- Belanja Subsidi	692	635	708
- Belanja Hibah	12,262	19,373	14,437
- Belanja Bantuan Sosial	26,768	11,517	10,603
- Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4,457	12,578	14,834
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	5,213	20,797	20,719
- Belanja Tak Terduga	837	1,725	2,573
Belanja Langsung	140,851	201,992	222,699
- Belanja Pegawai	7,560	23,816	23,568
- Belanja Barang dan Jasa	28,553	82,006	94,982
- Belanja Modal	104,738	96,170	106,207
Pembiayaan	65,386	40,467	33,370
Penerimaan	74,408	48,091	41,191

Tabel APBD

Setelah anda melihat contoh APBD di atas kita bisa mengidentifikasi komponen yang menyusun suatu APBD, secara umum APBD akan memuat dua komponen besar yaitu Pendapatan dan Pengeluaran. Baik kita akan bahas secara mendalam dua komponen tersebut.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
- Retribusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

b. Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

- Pendapatan Hibah

4.2 Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas :

- Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

b. Belanja Langsung

Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

5 Pengaruh APBD pada Pembangunan Ekonomi Daerah

APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut, oleh sebab itu penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi, Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi sebagai berikut :

- a. mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
- b. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan.
- c. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
- d. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD

C. Rangkuman

1. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi otorisasi ,fungsi perencanaan ,fungsi pengawasan , fungsi alokasi ,fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi
3. Komponen APBD terdiri atas Pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan terbagi atas Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah . Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan Belanja Langsung
4. APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut

D. Penugasan Mandiri

Anda telah mempelajari materi tentang anggaran pendapatan daerah, untuk lebih memahami dan mengetahui tentang arah pengembangan pembangunan di daerah. Coba cari APBD yang ada di daerah anda, kemudian tuliskan prioritas pembangunan yang tergambar pada agar secara tidak langsung anda peduli dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Tuliskan hasil kajian anda dalam buku catatan

E. Latihan Soal

Dengan mengucapkan rasa syukur anda telah menyelesaikan modul ini, sebelum anda melanjutkan dengan mengerjakan evaluasi silahkan untuk mengerjakan latihan soal agar dapat mengetahui tingkatan pemahaman pada kegiatan belajar ke tiga. Baik silahkan mengerjakan latihan soal dengan sebaik-baiknya.

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan setelah APBN ditetapkan
 - A. satu minggu
 - B. satu bulan
 - C. tiga minggu
 - D. tiga bulan
 - E. empat bulan
2. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah...
 - A. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
 - B. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
 - C. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

- D. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
 - E. Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA
3. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi....
- A. Otorisasi
 - B. perencanaan
 - C. pengawasan ,
 - D. alokasi
 - E. distribusi
4. Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah....
- A. Dana alokasi umum
 - B. Pajak Daerah
 - C. Retrebusi Daerah
 - D. Pajak hiburan
 - E. Parkir
5. APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Berikut bidang yang menjadi urusan wajib adalah....
- A. pendidikan,
 - B. kesehatan
 - C. perumahan
 - D. Energi dan sumber daya mineral
 - E. Kebudayaan
6. Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut....
- A. Belanja rutin
 - B. Belanja pembangunan
 - C. Belanja langsung
 - D. Belanja tidak langsung
 - E. Belanja pegawai
7. Komponen Belanja dibawah ini termasuk belanja tidak langsung *kecuali*....
- A. Belanja pegawai
 - B. Belanja modal
 - C. Belanja Bunga
 - D. Belanja Subsidi
 - E. Belanja Hibah
8. Dana alokasi umum termasuk dalam
- A. Dana perimbangan
 - B. Dana pembangunan
 - C. Dana penyeimbang
 - D. Dana otonomi daerah
 - E. Dana bencana

9. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk...
- A. Undang-undang
 - B. Kepres
 - C. Permendagri
 - D. Perda
 - E. Nota keuangan
10. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah...
- A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
 - B. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.
 - C. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran
 - D. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi
 - E. Meningkatkan status sosial para penguasa dan pengelola daerah